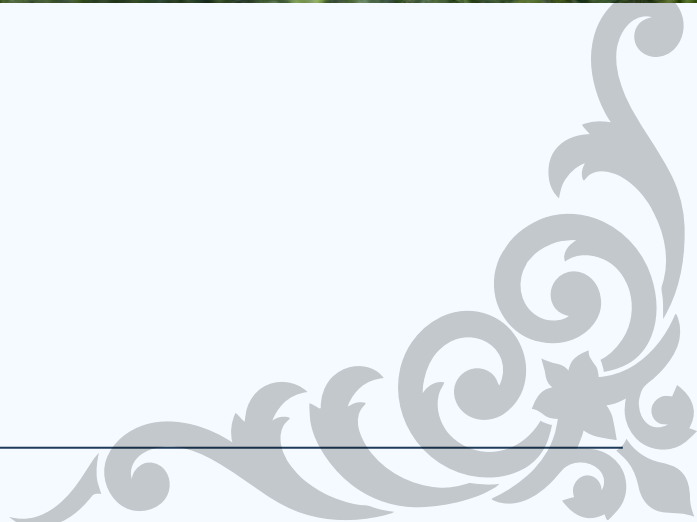


# MEMBANGUN EKOSISTEM LITERASI INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

## EXECUTIVE SUMMARY

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan ekonomi masyarakat, serta lemahnya implementasi kebijakan dan budaya baca yang belum terinternalisasi. Persoalan ini menjadi krusial karena berkorelasi langsung dengan degradasi kualitas sumber daya manusia, yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran, rendahnya kesadaran kesehatan, hingga melebarnya disparitas sosial-ekonomi. Meskipun berbagai intervensi telah dilakukan, tantangan fundamental tetap terletak pada gap antara desain kebijakan makro dengan realitas sosiologis di lapangan. Oleh karena itu, prioritas kebijakan difokuskan pada penguatan kebijakan literasi berbasis wilayah untuk memastikan implementasi lebih tepat sasaran. Pendekatan ini didukung oleh integrasi literasi dalam kebijakan sosial-ekonomi dan penguatan budaya literasi. Upaya sistemik ini menuntut sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai regulator serta pemerintah daerah sebagai eksekutor di tingkat lokal.



## PERMASALAHAN UTAMA

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia masih menjadi persoalan nyata dalam pembangunan sumber daya manusia. Keadaan ini terlihat dari laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 dimana posisi Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 81 negara. Capaian skor Indonesia pada berbagai aspek juga masih berada di bawah rata-rata negara OECD, yang mengindikasikan bahwa kemampuan peserta didik Indonesia dalam memahami dan mengolah informasi belum berkembang secara optimal. Kondisi ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Data BPS mencatat Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia berada pada skor 54,8. Angka tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas membaca belum sepenuhnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

**TABEL KINERJA BIDANG MATEMATIKA, MEMBACA DAN SAINS**

	Mathematics	Reading	Science
	Mean	Mean	Mean
OECD average	472	476	485
Singapore	575	543	561
Japan	536	516	547
Albania	368	358	376
Indonesia	366	359	383
Morocco	365	339	365

Sumber : Laporan PISA 2022

Dampak dari rendahnya literasi tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, keterbatasan literasi dapat mempersempit peluang individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dari sisi kesehatan, rendahnya kemampuan memahami informasi berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan terkait kesehatan (Nordheim & Huijts, 2025).

Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, karena individu dengan literasi rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap peluang peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, literasi tidak hanya menjadi isu pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kemampuan individu. Terdapat dinamika lebih luas yang memengaruhi perkembangan literasi, sehingga upaya peningkatannya tidak cukup hanya berfokus pada perubahan perilaku individu semata.

Pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif diperlukan agar intervensi yang dirancang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. Tanpa pendekatan yang mempertimbangkan konteks, rancangan kebijakan berisiko tidak berjalan efektif di tingkat implementasi.

Dengan mempertimbangkan luasnya dampak yang ditimbulkan, rendahnya literasi perlu diposisikan sebagai isu strategis yang memerlukan perhatian kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Policy brief ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan implementasi kebijakan literasi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat secara lebih merata.



# Faktor Penyebab Masalah

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia tidak bisa dipahami sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Situasi ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor struktural yang saling berhubungan satu sama lain. Selama ini, permasalahan literasi sering dianggap sebagai persoalan minat atau keinginan individu. Namun, pendekatan tersebut tidak bisa menggambarkan kompleksitas kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berikut merupakan faktor - faktor utama yang menyebabkan rendahnya literasi di Indonesia :

## Keterbatasan Ekonomi Masyarakat

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan literasi adalah rendahnya pendapatan keluarga. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan tempat tinggal. Sedangkan, untuk aspek pendidikan seperti membeli buku atau mengakses bahan bacaan, mereka tidak memiliki alokasi sumber daya untuk hal tersebut. Kondisi ini menciptakan lingkungan rumah tangga yang kurang memperhatikan pengembangan literasi sejak dini. Dalam jangka panjang, situasi ini membentuk siklus yang sulit diputus. Keterbatasan ekonomi menghambat akses terhadap sumber pembelajaran, sementara rendahnya literasi membatasi peluang individu untuk meningkatkan kesejahterannya (Nadeem et al., 2021).

## Ketimpangan Akses Pendidikan Antar Wilayah

Faktor lainnya adalah kesenjangan antar wilayah, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Perbedaan ketersediaan infrastruktur pendidikan, fasilitas belajar serta distribusi tenaga pendidik menyebabkan kualitas pembelajaran tidak merata antar wilayah. Kesenjangan tersebut menyebabkan siswa - siswa yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan memiliki peluang lebih kecil untuk mengembangkan kemampuan literasi mereka. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar daerah (Suarlin et al., 2026).

## Implementasi Kebijakan yang Belum Optimal

Berbagai kebijakan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, dan Kurikulum Merdeka telah dikeluarkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan umum seperti distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, keterbatasan kapasitas guru di daerah, serta kurangnya penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal membuat efektivitas kebijakan menjadi tidak merata. Kebijakan yang dirancang secara nasional sering kali belum mampu mengakomodasi keragaman konteks daerah, sehingga dampaknya terhadap peningkatan literasi masih terbatas (Suarlin et al., 2026).

## Lemahnya Budaya Literasi

Selain faktor struktural, aspek kultural juga berperan dalam rendahnya literasi. Aktivitas membaca masih sering dipandang sebagai kewajiban akademik, bukan sebagai kebutuhan atau kebiasaan sehari-hari. Program seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) belum sepenuhnya mampu membangun budaya membaca yang berkelanjutan, karena dalam praktiknya sering kali berorientasi pada pemenuhan administratif. Rendahnya keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial dalam membiasakan aktivitas membaca juga menyebabkan literasi belum berkembang sebagai praktik sosial yang mengakar (Rusdiyah et al., 2023).

Secara keseluruhan, rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, ketimpangan akses pendidikan, kelemahan implementasi kebijakan, serta budaya literasi yang belum berkembang. Keempat faktor ini saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rendahnya literasi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang bersumber pada ketimpangan akses pendidikan, lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan ekonomi, serta belum kokohnya budaya literasi. Oleh karena itu, intervensi perlu difokuskan pada perbaikan implementasi melalui pendekatan berbasis wilayah kemudian integrasi kebijakan literasi dengan program sosial-ekonomi serta penguatan budaya literasi. Dalam kerangka ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertindak sebagai koordinator utama, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

## “Penguatan Implementasi Kebijakan Literasi Berbasis Wilayah.

Rekomendasi ini bertujuan menjawab dua persoalan utama: ketimpangan akses pendidikan dan lemahnya implementasi kebijakan di daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menyusun kerangka kebijakan berbasis data untuk memetakan wilayah dengan literasi rendah sebagai prioritas intervensi. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk pemetaan awal, tetapi juga menjadi fondasi monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga capaian maupun kendala di lapangan dapat terpantau secara sistematis. Pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan ke dalam intervensi yang sesuai kebutuhan lokal, seperti redistribusi guru, penguatan sarana belajar, dan penyediaan akses teknologi dasar. Koordinasi lintas satuan pendidikan juga perlu dipastikan agar intervensi berjalan konsisten di seluruh wilayah. Dengan mekanisme terintegrasi ini, kendala implementasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui penyesuaian kebijakan atau pendampingan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan kebijakan lebih adaptif, tepat sasaran, serta berkontribusi pada pemerataan kualitas pembelajaran.

## “Integrasi Literasi Dalam Kebijakan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Budaya Literasi

Rekomendasi ini dirancang untuk menjawab dua tantangan yang saling berkaitan: hambatan ekonomi dan lemahnya budaya literasi. Pendekatan yang ditawarkan tidak berfokus pada penambahan program baru, melainkan pada optimalisasi mekanisme yang sudah ada agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung di lapangan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah perlu mengaitkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan aktivitas pembelajaran yang mendorong penggunaan bahan bacaan secara aktif. Bantuan finansial tidak boleh berhenti pada distribusi dana, tetapi harus diikuti dengan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar yang mengintegrasikan literasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sekolah dan guru berperan strategis dalam memastikan keterkaitan ini berjalan baik. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat keterhubungan antara sekolah dan lingkungan keluarga, misalnya melalui program pembiasaan membaca di luar jam sekolah. Dengan demikian, literasi tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga tumbuh dalam keseharian peserta didik. Strategi ini bertujuan meningkatkan partisipasi belajar, memperkuat penggunaan sumber bacaan, dan membangun fondasi budaya literasi yang berkelanjutan.

## REFERENSI :

BPS. (2026). STATISTIK INDONESIA STATISTICAL YEARBOOK OF INDONESIA 2026.

Nadeem, T., Akhtar, N., & Ahmad, M. (2021). A Study of the Relationship between Family Income and Literacy Level. *STATISTICS, COMPUTING AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH*, 3(2), 59-69. <https://doi.org/10.52700/scir.v3i2.50>

Nordheim, O., & Huijts, T. (2025). Social functioning and personal development among individuals with low literacy skills; the role of active labour market policy. *Journal of Social Policy*, 54(3), 912-938. <https://doi.org/10.1017/S0047279423000417>

Rusdiyah, E. F., Ar, Z. T., & Rahman, M. R. (2023). Literacy policy in southeast Asia: a comparative Study between Singapore, Malaysia, and Indonesia. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 13(2), 79-96. <https://doi.org/10.26529/cepsj.1214>

Suarlin, Elpisah, & MY, N. (2026). Addressing Educational Inequality in Indonesia: Policy Challenges and Digital Solutions for Disadvantaged Regions. *Edelweiss: Journal Of Innovation In Educational Research*, 3(3). <https://doi.org/10.62462/edelweiss.v3i3.97>